

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Novi Natalia Padang¹, Wendi Suprpto Padang², Lamtiur Lidia Gultom³

^{1,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

²Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Email: novipadang06@gmail.com¹, wendisuprptopadang@gmail.com²,

lamtiurlidiagultom@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how accountability and transparency affect the quality of financial reports at the General Election Commission in North Sumatra. The population used in this study is the KPU in North Sumatra. The data analysis technique used in the study is by using PLS-SEM for quantitative analysis. The results of this study indicate that transparency and accountability have a positive and significant effect on the quality of financial reports.

Keywords: *accountability, transparency, quality of financial reports*

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Ini termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membentuk KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan, dan pengawasan hasilnya. KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara adil, jujur, dan demokratis, serta memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dilindungi. Hasil audit yang diterima KPU dari tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan bahwa KPU selalu mendapatkan opini audit WDP. Selanjutnya, pada tahun 2017, KPU berhasil mendapatkan opini WTP yang menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penyusunan serta pelaporan keuangan di KPU pada tahun tersebut. Namun setelah menerima opini WTP pada tahun 2017, ternyata KPU belum dapat mempertahankan pencapaian itu karena pada tahun 2018 dan 2019 KPU lagi-lagi mendapat hasil opini WDP. Pada tahun 2020, KPU mendapatkan kembali opini WTP dan berhasil mempertahankannya selama tahun 2021 dan 2022. Namun, jika melihat fenomena yang terjadi pada tahun 2017, kemungkinan KPU mendapatkan opini WDP lagi tampaknya masih ada, karena KPU pernah meraih opini WTP di 2017 dan tahun setelahnya justru kembali menerima WDP di 2018 dan 2019. Apalagi tahun 2024 adalah tahun politik di mana akan diadakan Pemilu Presiden, DPD, dan DPRD untuk tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan dan temuan audit yang diperoleh BPK RI terhadap laporan keuangan KPU dari tahun 2014 sampai 2019.

Pedoman pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada KPU juga belum mengatur tentang:

1. Batas waktu yang ditetapkan bagi satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penerima hibah untuk mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. Tugas dan fungsi PPSPM dalam proses verifikasi bukti pertanggungjawaban;

3. Format pembukuan Bendahara Pengeluaran yang memudahkan penyusunan laporan realisasi anggaran hibah yang mencantumkan kode anggaran.

Akibatnya, revisi DIPA serta pengesahan belanja hibah Pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan tertib dan pembukuan transaksi realisasi belanja hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan andal dan lengkap.

KPU juga belum memiliki aplikasi pembukuan atas dana hibah pilkada serentak tahun 2020, sehingga proses identifikasi dan pengelompokan jenis belanja dilaksanakan secara manual per masing-masing pengeluaran, dan kemudian dijumlah dengan bantuan rumus aplikasi excel. Akibatnya, proses pencatatan dan pembukuan atas dana hibah menjadi tidak efisien, membutuhkan waktu lama dan upaya yang lebih besar, dan pencatatan transaksi pengeluaran tidak dapat dilakukan secara rinci sesuai kode akun atau mata anggaran serta risiko ketidaksesuaian pencatatan dengan bukti pertanggungjawaban.

Akuntabilitas berarti menyajikan dan melaporkan semua tindakan yang dilakukan sesuai d Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mampu membuktikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan serta prinsip hukum, etika, dan norma yang berlaku, serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Ciri ini menegaskan signifikansi akuntabilitas dalam pemerintah. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.dengan tugas kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Konsep ini sejalan dengan konsep pemeriksaan menyeluruh yang digunakan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh tentang seberapa hemat, efisien, dan efektif pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai bagian dari upayanya untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki pertanggungjawaban keuangan yang baik dan tepat. Dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan, melaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan, laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi akuntabel dan transparan. Adanya SAP diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Penelitian sebelumnya oleh de Villiers dan Dimes (2021) menemukan bukti empiris tentang bagaimana akuntabilitasmempengaruhikualitaslaporankeuangan.

Prinsip transparansi dapat diterapkan melalui beberapa cara, seperti memberikan cara yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik, pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan publik yang terbuka, serta menyediakan saluran komunikasi dan partisipasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip transparansi ini juga esensial untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abed, et al., (2022) berhasil mengungkap bahwa penerapan prinsip transparansi dapat mendorong pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Salah satu masalah penting bagi pemerintahan adalah laporan keuangan pemerintah karena dapat memberikan informasi penting tentang pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Sormin et al., 2022). Laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) adalah laporan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terkait penggunaan anggaran dan keuangan negara. LKKL memuat informasi tentang posisi keuangan, kinerja Laporan keuangan ini disusun secara periodik dan diwajibkan untuk disampaikan oleh setiap kementerian dan lembaga pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti publik, investor. Sementara di tahun 2022, KPU belum melakukan pengawasan yang cukup terhadap pengelolaan belanja, yaitu tentang: Pembagian paket pekerjaan; dokumen akuntabilitas yang tidak teratur; Perhitungan hasil kerja yang belum

diverifikasi dan belum didokumentasikan. Sistem Manajemen Kas (CMS) yang masih belum maksimal Pengeluaran yang terjadi belum didasari dengan bukti yang sah. Akibatnya, barang terbaik tidak dapat dihargai dengan baik; terdapat kemungkinan penyalahgunaan dana; hasil dari pengadaan barang dan jasa mungkin tidak sebanding dengan nilai pembayaran; serta ada pengeluaran yang tidak dapat dipastikan keberadaannya.

Penelitian ilmiah ini dilakukan dengan didasarkan pada kajian konseptual dan melalui analisis dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan tepat guna. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kualitas laporan Keuangan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini, masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik, publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri, maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Jansen dan Meckling dalam Santoso dan Joni (2012). Hendriksen (2005) dan Scott (2003) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah produk dari suatu proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi keuangan atau kegiatan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (Priyono dan Mutmainah, 2022). Dengan demikian, laporan keuangan adalah media komunikasi penting yang digunakan untuk mencerminkan keadaan keuangan perusahaan atau pemerintah serta menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang telah memenuhi prinsip relevansi, dapat dipercaya (reliable), dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Keempat ciri tersebut adalah syarat normatif yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu menilai kejadian di masa lalu atau saat ini, serta meramalkan masa depan, dan mengonfirmasi atau memperbaiki hasil penilaian di masa lalu. Dengan cara ini, informasi laporan keuangan yang penting dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya. Data yang berkaitan:

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu menilai peristiwa yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung, serta meramalkan masa depan, dan menegaskan atau

memperbaiki hasil penilaian di masa lalu. Oleh karena itu, data laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya. Informasi yang berkaitan: Informasi memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang ada sebelumnya. Data dapat mendukung pengguna untuk meramalkan masa depan berdasarkan hasil-hasil sebelumnya dan peristiwa yang sedang berlangsung. Informasi disampaikan secara tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disampaikan secara menyeluruh, meliputi semua data akuntansi yang mungkin memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan batasan yang ada. Data yang mendasari setiap poin informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan disampaikan dengan tegas supaya kesalahan dalam pemanfaatan informasi itu bisa dihindari.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan tersebut harus memuat ikhtisar dari transaksi keuangan pemerintah yang memberikan informasi mengenai keuangan suatu entitas sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah yang diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (Suratman, et al., 2022).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam akuntansi merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan pengungkapan informasi yang tepat (Ibrahim, et al., 2022). Akuntabilitas berkaitan pula dengan tanggung jawab sosial, di mana institusi atau organisasi harus mematuhi hukum yang ada dan meraih tujuan utama yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dapat membantu menjamin bahwa dana yang dikelola oleh lembaga atau organisasi tersebut dimanfaatkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis. Pelaksanaan akuntabilitas yang efektif dalam pemerintahan berpengaruh langsung terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan (Tran, et al., 2021). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mampu membuktikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan serta prinsip hukum, etika, dan norma yang berlaku, serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Ciri ini menegaskan signifikansi akuntabilitas dalam pemerintah. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip akuntabilitas dapat mendukung pemerintah agar laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Akuntabilitas yang baik akan menjamin bahwa instansi pemerintah tidak hanya mengikuti norma akuntansi, tetapi juga

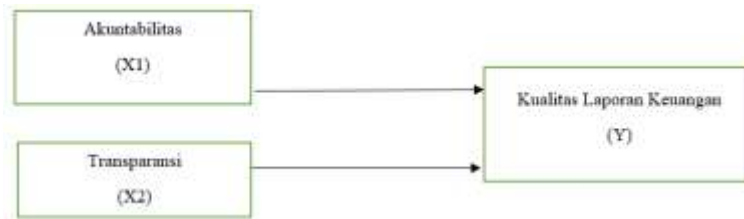
menjamin laporan keuangan yang tepat dan dapat diandalkan. Penerapan prinsip akuntabilitas tentu memerlukan pengendalian internal yang efektif untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan terhindar dari penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas di Lembaga pemerintahan akan memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan, dan melalui akuntabilitas tersebut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari para pemegang amanah untuk menyampaikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan semua aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberikan amanah, yaitu masyarakat.

Transparansi

Transparansi tersebut dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah selaku pembuat, pelaksana, dan penanggung jawab semua kebijakan yang ditetapkan untuk kemajuan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan mereka. Bagi pihak pemerintah, prinsip transparansi ini sangat penting dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat (Androniceanu, 2021). Oleh karena pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil keputusan krusial yang berpengaruh besar pada masyarakat, maka pemerintah wajib menyajikan informasi yang komprehensif tentang aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai alat krusial yang dapat mencegah penyalahgunaan dana publik yang seharusnya tidak berada dalam wewenang pemerintah. Transparansi merupakan prinsip yang memastikan hak atau akses setiap individu untuk menerima informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, cara pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh. Transparansi mengacu pada sikap terbuka dalam menyampaikan informasi tanpa menyembunyikan apapun oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Ciri ini menyoroti signifikansi transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah wajib menyediakan informasi publik, termasuk anggaran dan kebijakan, agar dapat diakses oleh masyarakat.

Prinsip transparansi dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik, pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan publik yang transparan, dan penyediaan saluran komunikasi serta partisipasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip transparansi ini juga krusial dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi juga bisa berkontribusi untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi di semua sisi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Melalui transparansi, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami cara pemerintah mengelola dan menggunakan anggaran. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah perlu menunjukkan transparansi di semua aspek, mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian informasi dalam laporan keuangannya. Tahap ini sangat krusial supaya masyarakat bisa memberikan evaluasi yang tepat mengenai penggunaan dana publik oleh pemerintah demi kepentingan umum. Penerapan prinsip keterbukaan oleh pemerintah sangat krusial untuk mencapai manajemen pemerintahan yang efektif dan menjamin kepercayaan masyarakat sepenuhnya terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan (Sofyani, et al., 2020).



Gambar 1 Kerangka Konsep

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu dapat membuktikan bahwa keputusan dan langkah yang diambil dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, etika, serta standar yang berlaku, sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat. Ciri ini menekankan signifikansi akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh de Villiers dan Dimes (2021) telah berhasil mengidentifikasi bukti empiris tentang dampak akuntabilitas terhadap mutu laporan keuangan pemerintah. Selaras dengan temuan tersebut, studi yang dilakukan oleh Tran, et al., (2021). Dalam konteks ini, penerapan prinsip akuntabilitas dapat mendukung pemerintah agar laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Akuntabilitas yang baik akan menjamin bahwa instansi pemerintah tidak hanya mengikuti norma akuntansi, tetapi juga menjamin laporan keuangan yang tepat dan dapat diandalkan. Penerapan prinsip akuntabilitas tentu memerlukan pengendalian internal yang efektif untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan terhindar dari penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas di Lembaga pemerintahan akan memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan, dan melalui akuntabilitas tersebut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin meningkat.

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi merupakan prinsip yang memastikan hak atau akses setiap individu untuk menerima informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, cara pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh. Transparansi mengacu pada sikap terbuka dalam menyampaikan informasi tanpa menyembunyikan apapun oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Ciri ini menyoroti signifikansi transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah wajib menyediakan informasi publik, termasuk anggaran dan kebijakan, agar dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang penting yang harus mudah diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk laporan keuangan. Dengan menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dapat menciptakan kepercayaan dan keterbukaan kepada masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Diperlukan data yang menyeluruh, tepat, dapat diandalkan, dan berkaitan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Jika kualitas laporan keuangan itu bisa dijamin, prinsip transparansi perlu diterapkan di setiap tahap penyusunan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan data hingga penyampaian informasi. Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip transparansi dapat menunjukkan seberapa jauh laporan keuangan pemerintah merefleksikan posisi keuangan dan aktivitas keuangannya. Di samping itu, prinsip transparansi juga akan mendorong pemerintah untuk menggunakan standar akuntansi yang lebih baik agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, relevan, dan dapat dipercaya. Temuan dari penelitian sebelumnya oleh Abed, et al., (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dapat mendorong pemerintah

untuk menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas. Prinsip transparansi dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik, pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan publik yang transparan, dan penyediaan saluran komunikasi serta partisipasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip transparansi ini juga krusial dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi juga bisa berkontribusi untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi di semua sisi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011).

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara. Sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdapat di kabupaten/kota Sumatera Utara yang berjumlah 33 instansi. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan teknik jenuh. Dimana teknik jenuh adalah teknik penentuan sampel ketika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga 33 instansi yang merupakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing kabupaten/kota dijadikan sebagai sampel penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan Kuesioner.

Teknik Analisa Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, data kuantitatif merupakan data yang diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan kuisisioner. Data primer yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif yang terdiri dari analisis deskriptif, dan analisis *SmartPLS*. Analisis data diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SmartPLS*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X1)

	Nilai <i>Outer Loading</i>	Kesimpulan
X1.1	0.757	Valid
X2.2	0.711	Valid
X3.3	0.770	Valid
X3.4	0.760	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil dari uji validitas menyatakan bahwa semua item yang terdapat pada variabel akuntabilitas memiliki nilai *outer loading* yang lebih besar dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel akuntabilitas dinyatakan valid.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Transparansi (X2)

	Nilai <i>Outer Loading</i>	Kesimpulan
X2.1	0.749	Valid
X2.2	0.743	Valid
X2.3	0.788	Valid
X3.4	0.751	Valid
X4.5	0.742	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil dari uji validitas menyatakan bahwa semua item yang terdapat pada variabel transparansi memiliki nilai *outer loading* yang lebih besar dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel transparansi dinyatakan valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

	Nilai <i>Outer Loading</i>	Kesimpulan
Y.1	0.763	Valid
Y.2	0.736	Valid
Y.3	0.750	Valid
Y.4	0.774	Valid
Y.5	0.755	Valid
Y.6	0.795	Valid
Y.7	0.720	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji validitas menyatakan bahwa semua item yang terdapat pada variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai *outer loading* yang lebih besar dari 0,7. Semua item pada variabel kualitas laporan keuangan dinyatakan valid.

Tabel 4 Hasil Average Variance Extracted

Variabel Penelitian	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0.563	Valid
Transparansi (X2)	0.565	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.580	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai AVE untuk masing-masing variabel akuntabilitas,transparansi, kualitas laporan keuangan dan perubahan budaya lebih besar dari nilai 0,5 sehingga setiap variabel dalam model penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen. Variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,07 dan nilai *Composite Reliability* > 0,07.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0.903	0.921	Reliabel
Transparansi (X2)	0.904	0.921	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.955	0.959	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki nilai diatas kriteria yang ditetapkan yaitu 0,70.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas berarti bahwa lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang mereka ambil selama menjalankan fungsinya. Hal ini menjamin layanan publik yang bertanggung jawab dari pemerintah (Ahmad et al., 2024). Hasil penelitian ini akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mampu membuktikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan serta prinsip hukum, etika, dan norma yang berlaku, serta memberikan keuntungan bagi masyarakat. Ciri ini menegaskan signifikansi akuntabilitas dalam pemerintah. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Studi sebelumnya oleh De Villiers dan Dimes (2021) menemukan bukti empiris tentang bagaimana akuntabilitas memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Mekanisme akuntabilitas, seperti pelaporan kinerja dan keuangan, harus diperkuat jika tidak ditegakkan, karena pemerintahan akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas yang efektif dalam pemerintahan berpengaruh langsung terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan (Tran, et al., 2021). Dalam konteks ini, penerapan prinsip akuntabilitas dapat mendukung pemerintah agar laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Akuntabilitas yang baik akan menjamin bahwa instansi pemerintah tidak hanya mengikuti norma akuntansi, tetapi juga menjamin laporan keuangan yang tepat dan dapat diandalkan. Penerapan prinsip akuntabilitas tentu memerlukan pengendalian internal yang efektif untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan terhindar dari penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas di Lembaga pemerintahan akan memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan, dan melalui akuntabilitas tersebut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin meningkat.

Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi menjadi kunci penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan masyarakat. Sehingga masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan kebutuhannya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini akan membantu pemerintah memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Sehingga partisipasi publik dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan pemerintah dengan memberikan masukan dan umpan balik terkait laporan keuangan, sehingga dapat membantu meningkatkan keandalan dari proses pelaporan keuangan.

Prinsip transparansi dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik, pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan publik yang transparan, dan penyediaan saluran komunikasi serta partisipasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip transparansi ini juga krusial dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi juga bisa berkontribusi untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sangat krusial bagi pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi di semua sisi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Lebih jauh lagi, dengan adanya akses yang mudah dan terbuka untuk masyarakat, publik dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan baik (Saleh, et al., 2021). Ini akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja keuangan pemerintah dengan lebih baik. Penjelasan itu mengindikasikan bahwa prinsip transparansi memiliki peranan krusial dalam memperbaiki mutu laporan keuangan di lembaga pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa praktik transparansi diintegrasikan dalam semua aspek penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang lebih berkualitas.

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah menjadi lebih mudah dipahami karena mudah diakses dan dapat diakses oleh publik (Mungiu-Pippidi, 2023). Hal ini akan meningkatkan kualitas data dan memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik. Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip transparansi diterapkan secara menyeluruh ke dalam setiap aspek penyusunan laporan keuangan untuk memastikan hasil laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abed et al. (2022) yang berhasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi akan mendorong pemerintah untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Sumatera Utara.
2. Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KPU Sumatera Utara.

Agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, maka saran peneliti antara lain:

1. Karena terbukti berdampak besar pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, KPU Sumatera Utara harus terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya.
2. Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan tentang komponen lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan,

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, I. A., Hussin, N., Haddad, H., Almubaydeen, T. H., & Ali, M. A. (2022). *Creative Accounting Determination and Financial Reporting Quality: the Integration of Transparency and Disclosure*. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.3390/joitmc8010038>
- Ahmad, A. Y. A. B., Abusaimh, H., Rababah, A., Alqsass, M., Al-Olima, N., & Hamdan, M. (2024). *Assessment of Effects in Advances of Accounting Technologies on Quality Financial Reports in Jordanian Public Sector*. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 133-142. <http://dx.doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.011>

- Masnila, N., Firmansyah, F., Febriantoko, J., Mayasari, R., & Said, J. (2022). *Quality of Financial Reporting and Impact of GGG Implementation: Study on Local Government in Indonesia. 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*. 12-19. Atlantis Press. <http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220202.003>
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mungiu-Pippidi, A. (2023). *Transparency and Corruption: Measuring Real Transparency by a New Index. Regulation & Governance*, 17(4), 1094-1113. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rego.12502>
- Padang, N.N. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 163-176. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMAT/article/view/3142>
- Padang, N. N. ., & Padang, W. S. . (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303-318. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/298>
- Padang, N. N. . (2024). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 146-157. Retrieved from <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4087>.
- Padang, N. N. ., & Padang, W. S. . (2024). PENGARUH DANA PERIMBANGAN BELANJA MODAL DAN FISCAL STRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 73-86. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3524>.
- Padang, N. N. . (2023). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 130-135. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461>.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011>
- Saleh, H., Rosad, I., Manda, D., Maulana, Z., & Idris, S. (2021). *The Effect of Good Governance on Financial Performance: An Empirical Study on the Siri Culture. The Journal of Asian Finance, Economics and Business*. 8(5). 795-806. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/303>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). *Improving Service Quality, Accountability and Transparency of Local Government: The Intervening Role of Information Technology Governance. Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Tarigan, I. ., Haloho, E. ., Padang, N. N. ., & Purba, I. R. . (2023). Pengaruh Reputasi Dan Pemasaran Media Sosial Terhadap Daya Saing Universitas Katolik Santo Thomas Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 252-261. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/2982>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). *The Role of Accountability in Determining the Relationship between Financial Reporting Quality and the Performance of Public Organizations: Evidence from Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106801.